

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jatuhnya rezim Orde Baru yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 1 Mei 1998 menandai kelahiran Orde Reformasi. Kungkungan politik yang berlangsung selama 32 tahun akhirnya berakhir dengan dibukanya keran demokrasi. Pada tahun 1999 dengan persiapan yang singkat, Indonesia berhasil melaksanakan pemilihan umum demokratis pertama sejak tahun 1955. Setelah berlangsung selama 16 tahun, Orde Reformasi telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 3 kali. Pemilihan umum yang kemudian dikenal sebagai pemilu adalah ajang rekrutmen politik menjadi wadah bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, baik sebagai yang dipilih maupun sebagai yang memilih. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu adalah:

Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Menjelang dilaksanakannya pemilu pada tahun 2014, persiapan pelaksanaan pemilu diwarnai dengan banyak fenomena yang menarik. Dimulai dari proses verifikasi partai politik peserta pemilu yang sarat akan pro dan kontra sehingga hanya ada 10 partai nasional yang lolos sebelum akhirnya PKPI dan PBB juga ikut lolos<sup>2</sup>. Setelah proses verifikasi selesai, muncul masalah baru yang tak kalah pelik, yakni dibukanya lowongan calon legislatif yang terbuka untuk masyarakat umum oleh beberapa partai seperti Partai Gerindra<sup>3</sup> yang kemudian dilakukan pula oleh Partai Demokrat<sup>4</sup>. Menyerap sebanyak mungkin SDM yang berkualitas dijadikan alasan oleh partai-partai tersebut untuk membenarkan langkah mereka. Langkah yang dilakukan oleh beberapa partai ini memang tidak dapat dipersalahkan, namun pertanyaan yang kemudian timbul adalah seperti apa kualitas kader yang dimiliki partai tersebut sehingga harus membuka lowongan *nyaleg*, apakah niatan mereka murni untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atau ada alasan lain seperti buruknya kualitas kader yang dimiliki. Jika alasan terakhir yang menjadi alasan dibukanya lowongan *nyaleg* tersebut, maka partai-partai tersebut telah gagal dalam melaksanakan kaderisasi dan hal itu tentu kabar buruk bagi proses politik dan akan kembali menghasilkan kandidat 4L (*loe lagi loe lagi*).

---

<sup>2</sup> <http://www.antarane.ws.com/berita/351985/kpu-tetapkan-10-parpol-peserta-pemilu-2014>.  
Diunduh pada 00.14, 26 Februari 2014

<sup>3</sup> <http://www.beritasatu.com/nasional/91708-hari-ini-gerindra-mulai-buka-lowongan-caleg-di-media.html>. Diunduh pada 00.14, 26 Februari 2014

Belum selesai dengan masalah-masalah di atas, kembali muncul masalah baru yang menyeret KPU menjadi aktor utamanya, yakni permasalahan DPT yang selalu berulang tiap akan diselenggarakannya pemilu. Masalah validitas menjadi topik utama, setelah ditemukan jutaan pemilih fiktif yang terdaftar dalam draf DPT yang diserahkan KPU kepada partai politik peserta pemilu<sup>5</sup>.

Di balik semua peristiwa yang terjadi selama persiapan penyelenggaraan pemilu yang telah disebutkan di atas, tersimpan satu persoalan yang sebenarnya telah lama menjadi topik bahasan dalam ilmu politik, yakni terkait perilaku elit politik Indonesia. Elit politik kini tengah disorot akibat berbagai kasus yang menimpa mereka. Masih segar di ingatan kita saat Arifinto, salah seorang anggota DPR dari Fraksi PKS, kedapatan tengah menyaksikan video mesum saat sidang paripurna tengah berlangsung<sup>6</sup>.

Selain kasus asusila, banyak pula elit politik yang tersangkut kasus korupsi seperti kasus suap wisma atlet. Diawali dengan ditangkapnya Sekretaris Menpora Wafid Muharram<sup>7</sup>, kasus Hambalang ini akhirnya menyeret banyak muka-muka tenar seperti Angelina Sondakh<sup>8</sup>, Menpora

---

<sup>5</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/06/078527391/Pemilih-Siluman-Masih-71-Juta-Jiwa>.  
Diunduh pada 00.15, 26 Februari 2014

<sup>6</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2011/04/08/078326179/Arifinto-Akui-Tonton-Video-Porno>.  
Diunduh pada 00.15, 26 Februari 2014

<sup>7</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/04/21/kpk-cokok-sekretaris-menteri-pemuda-dan->

Andi Mallarangeng<sup>9</sup>, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum<sup>10</sup>. Ketika proses hukum kasus Hambalang tengah berlangsung, kasus lain muncul dan menimpa elit politik lainnya dan kali ini PKS yang menjadi pesakitan. Berawal dari operasi tangkap tangan KPK yang akhirnya berhasil menangkap Ahmad Fathanah, terungkaplah kasus suap impor daging di Kementerian Pertanian yang akhirnya menyeret Luthfi Hasan Ishaq yang saat itu menjabat sebagai Presiden PKS menjadi tersangka<sup>11</sup>.

Korupsi tidak hanya terjadi di lembaga legislatif saja, namun juga terjadi di lembaga eksekutif. Setelah Andi Mallarangeng (eks Menpora), kini giliran Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Provinsi Banten yang menjadi tahanan KPK. Ratu Atut diduga melakukan *mark up* dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.<sup>12</sup>

Rentetan kasus di atas menimbulkan potensi menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik beserta para elitnya. Survei LSI (Lembaga Survey Indonesia) merilis hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap elit politik menurun drastis. *Quick poll* yang dilakukan LSI pada tanggal 3-5 Juli 2013 dan dengan *margin error* sebesar 2,9% ini menyebutkan 51,5%

<sup>9</sup>[http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/65079/2012/12/07/andi\\_mallarangeng\\_resmi\\_menjadi\\_tersangka.tvOne](http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/65079/2012/12/07/andi_mallarangeng_resmi_menjadi_tersangka.tvOne). Diunduh pada 00.15, 26 Februari 2014

<sup>10</sup><http://nasional.kompas.com/read/2013/02/22/19193933/Anas.Urbaningrum.Resmi.Tersangka.Hambalang>. Diunduh pada 00.15, 26 Februari 2014

<sup>11</sup><http://www.tempo.co/read/news/2013/01/30/063458015/Presiden-PKS-Jadi-Tersangka-Suap-Import-Daging>. Diunduh pada 00.16, 26 Februari 2014

<sup>12</sup><http://www.tempo.co/read/news/2014/01/07/063542993/Atut-dan-Wawan-Jadi-Tersangka->

masyarakat sudah tidak percaya terhadap komitmen elit politik untuk melakukan hal baik dalam kebijakan maupun perilaku dan hanya 37,5% masyarakat yang masih memiliki kepercayaan terhadap elit politik<sup>13</sup>. Apatisme yang muncul di masyarakat menimbulkan kekhawatiran akan potensi angka golput yang meningkat. Angka golput pada Pemilu 1999 sebesar 6,3%, Pemilu 2004 naik menjadi 16%, dan Pemilu 2009 melejit menjadi 29,1%, dan angka golput dalam Pemilu 2014 diprediksi mencapai 40%.<sup>14</sup>

Buruknya perilaku elit parpol yang berakibat pada potensi meningkatnya angka golput tentu menjadi referensi buruk bagi pemilih pemula di Pemilu 2014. Seperti yang diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan jumlah pemilih pemula yang berusia 17 sampai 20 tahun sekitar 14 juta orang, sedangkan yang berusia 20 sampai 30 tahun sekitar 45,6 juta jiwa, jumlah tersebut tentu sangat potensial.<sup>15</sup> Dengan jumlah yang sangat besar, pemilih pemula berpotensi untuk menentukan arah dari berlangsungnya Pemilu 2014.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> <http://news.detik.com/read/2013/07/07/151425/2294892/10/survei-lsi-515--masyarakat-tak-percaya-moral-elit-politik?nd772204btr>. Diunduh pada 00.16, 26 Februari 2014

<sup>14</sup> <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/12/246022/Lingkar-an-Setan-Partisipasi-Pemilu>. Diunduh pada 00.16, 26 Februari 2014

<sup>15</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2013/07/25/1705154/Pemilih.Pemula.Capai.14.Juta>. Diunduh pada 00.16, 26 Februari 2014

Sesuai dengan eksplanasi di atas, keberadaan pemilih pemula selalu menjadi bahasan menarik setiap kali pemilu akan diadakan, dan oleh karena itu pula penulis memutuskan untuk meneliti tentang pengaruh perilaku elit partai politik terhadap tingkat perilaku pemilih pemula menjelang Pemilu Legislatif 2014. Penelitian deskriptif kuantitatif ini akan menggunakan pemilih pemula yang terdapat di SMK Indonesia Yogyakarta sebagai studi kasusnya. Alasan dipilihnya sekolah ini sebagai objek penelitian dikarenakan sekolah ini dikenal sebagai salah satu SMK yang menekankan nilai-nilai yang luhur kepada siswanya seperti kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab sehingga melahirkan siswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur tersebut, nilai-nilai tersebut akan menjadi landasan dan tolak ukur yang baik bagi siswa ketika menilai perilaku yang ditunjukkan oleh elite partai politik. SMK Indonesia Yogyakarta juga merupakan sekolah umum, sehingga diharapkan dapat memberikan variasi sampel yang berasal dari berbagai macam latar belakang sosial. Kualifikasi di atas menjadi alasan utama bagi peneliti

.....

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah hubungan antara perilaku elit partai politik dan perilaku politik pemilih di SMK Indonesia Yogyakarta pemula menjelang Pemilu 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji keterkaitan antara perilaku elit partai politik terhadap perilaku politik pemilih pemula SMK Indonesia Yogyakarta menjelang Pemilu 2014.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik dan pemerintahan khususnya pada bahasan pemilu dan perilaku politik di Indonesia.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada kegiatan penelitian berikutnya yang terkait dengan permasalahan pemilu dan perilaku politik maupun kepada

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Perilaku Politik**

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Perilaku politik dapat dibagi menjadi dua, yakni perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah, dan perilaku politik warga negara biasa baik itu individu maupun kelompok. Perilaku politik merupakan proses timbal balik antara pembuat keputusan dan individu warga negara biasa yang dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik.<sup>17</sup>

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik yang meliputi aktor politik, aktivis politik, dan individu warga negara biasa; agregasi politik yakni kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, dan lembaga pemerintahan; dan tipologi kepribadian politik seperti otoriter, machiavelist, dan demokratis.<sup>18</sup>

Kajian terhadap perilaku politik seringkali dijelaskan dari sudut pandang psikologi, di samping pendekatan struktural fungsional dan struktural konflik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi



perilaku politik individu yang merupakan kombinasi dari dari ketiga pendekatan tersebut adalah<sup>19</sup>:

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sitem budaya, dan media massa.
- b. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama sekolah, dan *peer group*.
- c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- d. Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi dan keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, kehadiran orang lain, suasana kelompok, ancaman, dll.

Berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh Jefry M. Paige<sup>20</sup>, terdapat tiga variabel yang membentuk sebuah perilaku atau partisipasi politik seseorang, yakni: *independent variable*; *intervening variable*; dan *dependent variable*. Kesadaran politik serta kepercayaan terhadap pemerintah adalah dua faktor yang terdapat dalam

Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup sedangkan yang dimaksud dengan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya atau tidak.<sup>21</sup>

Kim<sup>22</sup> telah mengkaji variabel-variabel yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu dalam pengukuran kepercayaan publik, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa kepercayaan publik setidaknya dapat diukur dari lima variabel yaitu: komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan. Kesadaran dan kepercayaan tersebut tidak berdiri sendiri, dimana kedua faktor tersebut juga sangat bergantung terhadap *independent variable* yang dapat berwujud kelas sosial dan ekonomi, tingkat pendidikan, afiliasi politik orang tua, pengalaman berorganisasi, dan lain-lain.

---

<sup>21</sup> Surbakti. *Ibid.* hlm. 144.

<sup>22</sup> Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 368-369.

Lain halnya dengan apa yang disampaikan Nursal, ada empat pendekatan untuk melihat perilaku pemilih, yaitu<sup>23</sup>:

- a. Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini juga dikenal sebagai Mazhab Columbia, yang menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih.
- b. Pendekatan psikologis, yang dikenal juga sebagai Mazhab Michigan didasari oleh sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap tersebut terbentuk melalui sosialisasi yang memakan waktu lama bahkan bisa jadi sejak pemilih berusia dini karena pengaruh politik dari orang tuanya. Proses panjang sosialisasi seperti itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Ikatan inilah yang disebut dengan identifikasi partai.
- c. Pendekatan rasional, melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Pertimbangan yang timbul adalah apa konsekuensi dari pilihan yang dilakukan, apakah suaranya dapat

<sup>23</sup> Adman Nursal, *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru*

mempengaruhi hasil sesuai dengan yang diharapkan, dan perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama dalam membuat keputusan untuk memilih atau tidak memilih.

- d. Pendekatan marketing, merupakan sebuah pengembangan model perilaku pemilih dengan menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti media massa.

11.4.1.1. Pendekatan kognitif dengan kognitif yang berbeda

## 2. Teori Elite

Istilah elite secara etimologis berasal dari kata *eligere*, yang berarti memilih. Elite kemudian menjadi kata yang dipilih untuk menjelaskan sekelompok orang-orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat<sup>24</sup>. Teori elit politik sendiri baru lahir pada medio 1950-an, hasil dari diskusi seru para ilmuwan sosial seperti Schumpeter, Laswell, dan Wright Mills, yang mengkaji tulisan-tulisan dari para pemikir Eropa pada masa awal munculnya fasisme, seperti Pareto, Mosca, Michels, dan Gasset<sup>25</sup>.

Keller mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan<sup>26</sup>. Pertama, para ahli seperti Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto yang beranggapan bahwa golongan elite adalah golongan elite tunggal, yang biasa disebut elite politik. Kedua, para ahli seperti Saint Simon, Karl Mainnheim, dan Raymond Aron yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan.

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka dalam kehidupan sosial dan politik<sup>27</sup>. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya

<sup>24</sup> Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit dalam Masyarakat Modern*. Jakarta, CV Rajawali, 1984, hlm 3.

<sup>25</sup> Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit dalam Masyarakat Modern*. Jakarta, CV Rajawali, 1984, hlm 100.

elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elit*).

Menurut Mosca<sup>28</sup>, sebuah masyarakat selalu memunculkan dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, kelompok ini oleh Mosca disebut sebagai *political elite*. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah. Mosca lebih lanjut menjelaskan bahwa ada dua karakteristik yang membedakan elite, yaitu kecakapan memimpin dan menjalankan kontrol politik.

Pandangan berbeda datang dari Saint Simon yang dalam karyanya banyak membahas tentang bagaimana masyarakat industri harus diatur. Saint Simon menolak model elite politik tunggal yang dominan dan menggantinya dengan elite industri. Saint Simon membagi masyarakat ke dalam tiga kelas sosial yang terpisah dan menjalankan fungsi-fungsi sosial yang jelas, yaitu perencanaan tindakan sosial (fungsi intelegensi), pekerjaan industri yang esensial

(fungsi motorik), dan pemenuhan kebutuhan rohani manusia (fungsi sensorik). Saint Simon menilai bahwa produsen industri sebagai sebuah kelompok elite merupakan pemegang posisi yang lebih strategis dalam tata sosial yang baru dibandingkan dengan para pemimpin politik kuno<sup>29</sup>.

Karl Manheim yang tergabung bersama kelompok ahli yang menolak konsep elite tunggal membedakan dua elite yang berbeda secara fundamental, yaitu elite integratif yang terdiri atas pemimpin politik dan organisasi. Elite integratif bekerja melalui organisasi politik formal yang berfungsi mengintegrasikan sejumlah besar kehendak perseorangan. Tipe elite kedua adalah elite sublimatif, yang terdiri dari tokoh agama, seniman, dan intelektual yang bekerja melalui saluran informal, seperti golongan, dan kelompok-kelompok kecil<sup>30</sup>.

Pandangan senada dikemukakan oleh Raymond Aron bahwa elite adalah orang-orang yang memiliki kemampuan membangkitkan perhatian masyarakat, tetapi hanya kelompok kepemimpinan tertentu yang memiliki dampak sosial yang luas dan bertahan lama, yakni elite

### 3. Pemilih Pemula

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri yang melekat pada negara yang menganut paham demokrasi. Dengan demikian berarti pemilu merupakan sarana yang penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan berdemokrasi di negaranya yaitu dengan memilih wakil-wakilnya dalam kurun periode tertentu untuk menjalankan dan mengendalikan roda pemerintahan.<sup>32</sup>

Rakyat yang kemudian sering disebut konstituen, menjadi sasaran para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-program pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang pemungutan suara. Sistem pemilihan yang berjalan di suatu negara menjadi faktor penting dalam menentukan tipe sistem kepartaian negara tersebut.

Dalam Pemilu, pemilih adalah WNI yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin<sup>33</sup>, sedangkan kata mula sendiri berarti yang paling awal, dan pemula menunjukkan orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu.<sup>34</sup> Ganewati Wuryandari kemudian menggunakan istilah pemilih muda, dimana dijelaskan bahwa pemilih muda adalah seseorang yang baru pertama kali mengikuti pemilu.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta, Liberty, 1984, hlm. 81.

<sup>33</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Pasal 1(25) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>34</sup> [bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php](http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php). Diunduh pada 00.20, 26 Februari 2014



Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula adalah WNI yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pemilih pemula sebagai pemilih muda yang baru menggunakan hak pilihnya, atau lebih spesifik lagi adalah siswa Sekolah Menengah Umum dan sederajat yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, sehingga pemilih pemula yang berada di luar konsep tersebut bukanlah objek dari penelitian ini.

#### **4. Pemilu**

##### **a. Pengertian Pemilu**

Secara umum pengertian dari Pemilihan Umum yang sering disebut dengan istilah Pemilu adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat ataupun pejabat-pejabat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat atau DPR. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 1 (1) dan (2), yang berbunyi:

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Pasal 1 (1) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>37</sup>

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri yang melekat pada negara yang menganut paham demokrasi. Dengan demikian berarti pemilu merupakan sarana yang penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan berdemokrasi di negaranya yaitu dengan memilih wakil-wakilnya dalam kurun periode tertentu untuk menjalankan dan mengendalikan roda pemerintahan.<sup>38</sup>

Para pemilihnya ini kemudian sering disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-program pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang pemungutan suara. Sistem pemilihan yang berjalan di suatu negara menjadi faktor penting dalam menentukan tipe sistem kepartaian negara tersebut.

---

<sup>37</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Pasal 1(2) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## b. Sistem Pemilu

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasi, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- i. *Singel member constituency* (satu daerah pemilihan satu wakil)
- ii. *Multi member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil).<sup>39</sup>

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas atau (suara terbanyak). Sedangkan dalam sistem proporsional satu wilayah besar memilih beberapa wakil. Perbedaan pokok dalam dua sistem ini adalah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi asing masing partai politik.

---

<sup>39</sup> Budiardjo, *op. cit.* hlm 461-462

## 5. Partai politik

### a. Pengertian Partai Politik

Ada beberapa pengertian partai politik menurut beberapa pakar politik, antara lain Carl J. Friedrich, Sigmund Neumann, Giovanni Sartori.<sup>40</sup> Friedrich berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat riil maupun materil. Pandangan yang hampir serupa juga dinyatakan oleh Neumann yang berpendapat bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Definisi yang lebih praktis diungkapkan oleh Giovanni Sartori yang menyatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

## b. Fungsi Partai Politik

Secara umum, fungsi dari partai politik adalah melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Berikut beberapa fungsi dari partai politik, antara lain:<sup>41</sup>

### i. Komunikasi Politik

Salah satu fungsi dari partai politik adalah menyalurkan beberapa ide dan pendapat serta aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga ketidakjelasan ide dan pendapat didalam masyarakat dapat berkurang. Pendapat dan ide yang berbeda di masyarakat akomodasi oleh partai yang kemudian disalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan tentu saja berdasarkan atas kepentingan bersama. Selain itu partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebar luaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi yang timbal balik sehingga peran dari partai politik berupa penghubung antara

... antara pemerintah dan masyarakat.

## ii. Sosialisasi Politik

Peran lain dari partai politik adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang utamanya berlaku setiap kalangan masyarakat. Sosialisasi politik biasanya berjalan secara bertahap dari masa kanak-kanak sampai mencapai dewasa. Sosialisasi politik juga mencakup proses melalui arah mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari generasi ke generasi.

## iii. Rekrutment Politik

Partai politik juga berfungsi dalam mencari atau mengajak warga negara untuk turut aktif dalam kegiatan politik atau dengan kata lain menjadi kader partai. Dengan demikian partai politik dapat memperluas partisipasi politik pada kalangan masyarakat. Dengan melaksanakan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik yang bersangkutan pada dasarnya tidak perlu khawatir akan masa depan kepemimpinan bangsa karena nantinya secara tidak langsung partai-partai politik tersebut telah dapat memenuhi

individu yang berbakat dan berpotensi untuk dapat mengambil alih pucuk pimpinan.

iv. Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penyerapan input kebutuhan, tuntutan dan kepentingan rakyat oleh legislator yang bertujuan agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

v. Agregasi kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan suatu kebijakan publik.

vi. Pengendalian Konflik

Partai politik merupakan lembaga yang mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik serta menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik serta membawa permasalahan kedalam musyawarah badan

vii. Kontrol Politik

Kontrol politik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tolak ukur suatu kontrol politik yang berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik yang telah dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk meluruskan kebijakan atau pelaksanaannya



## **F. Definisi Konseptual**

Ada beberapa konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1. Perilaku politik adalah kegiatan atau aktivitas yang diperlihatkan oleh elite partai politik yang memegang jabatan di lembaga-lembaga negara dan juga perilaku politik yang ditunjukkan oleh pemilih pemula sebagai pihak yang dapat mempengaruhi pemerintah atau lembaga negara dalam membuat kebijakan.**
- 2. Elite partai politik adalah elite yang berada dalam partai politik yang ikut serta dalam Pemilu Legislatif 2014.**
- 3. Partai politik adalah organisasi politik yang ikut serta dalam Pemilu legislatif 2014.**
- 4. Pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki hak pilih dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2014.**
- 5. Pemilu legislatif adalah proses partisipasi politik masyarakat yang memiliki hak pilih dalam memberikan suaranya kepada kandidat**

## G. Definisi Operasional

Berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh Jeffrey M. Paige<sup>42</sup>, terdapat tiga variabel yang membentuk sebuah perilaku atau partisipasi politik seseorang, yakni: *independent variable*; *intervening variable*; dan *dependent variable*. Dalam penelitian ini yang menjadi *independent variable* adalah perilaku elite partai politik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun *dependent variable* dalam penelitian ini adalah perilaku politik pemilih pemula di SMK Indonesia Yogyakarta, sedangkan yang menjadi *intervening variable* dalam penelitian ini adalah kesadaran politik para pemilih pemula dan kepercayaan mereka terhadap proses politik yang berjalan. Berikut adalah indikator-indikator yang terdapat dalam kesadaran politik serta kepercayaan terhadap proses politik yang berjalan, yakni:

### 1. Kesadaran politik pemilih pemula

Surbakti<sup>43</sup> mengatakan bahwa yang dimaksud kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Melihat dari pengertian kesadaran politik di atas, maka dapat diuraikan yang menjadi ciri-ciri seseorang yang sadar dalam berpolitik antara lain (a) Mengerti hak

<sup>42</sup> Surbakti. *Op.cit.* hlm. 144-145.

<sup>43</sup> Surbakti. *Ibid.* hlm. 144.

dan kewajiban sebagai warga Negara, (b) memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap lingkungan masyarakat dan politik dan (c) Mempunyai minat dan perhatian seorang warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik.

## **2. Kepercayaan pemilih pemula**

Kim<sup>44</sup> telah mengkaji variabel-variabel yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu dalam pengukuran kepercayaan publik, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa kepercayaan publik setidaknya dapat diukur dari lima variabel yaitu: komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan.

## **3. Pendekatan perilaku politik**

Selain dua variabel di atas, peneliti juga menggunakan beberapa pendekatan perilaku untuk membantu menerjemahkan perilaku politik pemilih pemula, yang nantinya akan tercermin dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pendekatan yang digunakan antara lain:

- a. pendekatan sosiologis, menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih.

---

<sup>44</sup> Agus Dwiyanto, *Op.cit*, hlm. 368-369.

- b. pendekatan psikologis, menjelaskan tentang proses panjang sosialisasi yang kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang disebut dengan identifikasi partai.
- c. pendekatan rasional, melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Pertimbangan yang timbul adalah apa konsekuensi dari pilihan yang dilakukan, apakah suaranya dapat mempengaruhi hasil sesuai dengan yang diharapkan, perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada, terutama dalam membuat keputusan untuk memilih atau tidak memilih.
- d. pendekatan marketing, merupakan sebuah pengembangan model perilaku pemilih dengan menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti media massa. Dalam pendekatan ini, terdapat tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah, yaitu: isu dan kebijakan politik, citra sosial, perasaan emosional, citra kandidat, peristiwa terkini, peristiwa personal kandidat, faktor/isu epistemik.

## **H. Hipotesis**

Berdasarkan hasil analisa terhadap indikator-indikator dari tiap-tiap variabel yang ada dalam penelitian ini, penulis telah menyimpulkan beberapa hipotesis yang dapat diajukan untuk penelitian ini, yakni:

- H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kesadaran politik terhadap perilaku pemilih pemula.
- H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kepercayaan terhadap pemerintah terhadap perilaku pemilih pemula.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menganalisa dan menginterpretasikan data dan informasi dari berbagai objek penelitian yang nantinya akan menghasilkan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini adalah tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang dibahas. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola.<sup>45</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di SMK Indonesia Yogyakarta.

## **3. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber penelitian. Data primer dari penelitian diperoleh dari hasil pembagian kuesioner terhadap sampel yang telah ditetapkan yakni pemilih pemula yang terdapat di SMK Indonesia Yogyakarta.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber selain objek utama penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua data dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yang berasal dari penelitian terdahulu, buku,

1.11. Jurnal online, media cetak dan media elektronik.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Kuesioner**

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk lembaran yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku yang akan diisi oleh sampel atau responden<sup>46</sup>. Responden dalam penelitian ini adalah pemilih pemula yang terdapat di SMK Indonesia Yogyakarta. Tipe kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kuesioner terbuka.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumen tersebut dapat berasal dari surat kabar, majalah, arsip, jurnal dan

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti.<sup>47</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih pemula yang terdapat di SMK Indonesia Yogyakarta.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti dan oleh karenanya sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri<sup>48</sup>. Rumus yang digunakan untuk menentukan besaran sampel yaitu rumus Slovin<sup>49</sup>, yakni:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

$n$  = besaran sampel

$N$  = besaran populasi

$e$  = nilai tingkat yang diinginkan dalam penelitian ini sebesar 10%



## 6. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik acak berkelompok atau *cluster random sampling*. Teknik ini digunakan karena adanya keterbatasan akibat ketiadaan kerangka sampel. Dikarenakan karakteristik kelompok sampel adalah homogen maka teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik penarikan sampel satu tahap (*a stage cluster random sampling*)<sup>50</sup>.

## 7. Teknik Analisis Data

Setelah data hasil penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data bertujuan untuk menyusun dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh oleh peneliti.<sup>51</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier digunakan untuk menguji hubungan antara sebuah variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen. Berikut adalah tahap-tahap yang terdapat dalam proses analisis data, yakni<sup>52</sup>:

- a. *Data coding*, merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca oleh mesin pengolah data seperti komputer.
- b. *Data entering*, merupakan proses pemindahan data yang telah diubah menjadi kode ke dalam mesin pengolah data yakni SPSS 17.0.

<sup>50</sup> Bambang, *Ibid.* hlm. 132.

<sup>51</sup> Bambang, *Ibid.* hlm. 170.

<sup>52</sup> Bambang, *Ibid.* hlm. 171-207.

- c. *Data cleaning*, memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam mesin pengolahan data sudah sesuai dengan data sebenarnya.
- d. *Data output*, adalah hasil pengolahan data yang bentuknya dapat berupa angka, grafik, dll.
- e. *Data analyzing*, merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data, dalam penelitian ini dilakukan beberapa pengujian terhadap data yakni: uji validitas dan reliabilitas data, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi linier berganda. Kemudian menganalisis data dari hasil yang sudah ada pada tahap hasil pengolahan data
- f. Pengujian hipotesis, adalah proses pengujian terhadap hipotesis